

ABSTRAK

Muh. Hasrul (105031400718), Eksistensi Peraturan Daerah Yang Responsif (Studi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah), dibimbing oleh **Fatmawati dan Ihyani Malik**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi peraturan daerah yang responsif Tentang pengelolaan sampah di Kota Makassar dan untuk mengetahui pengelolaan sampah yang efektif di Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi Eksistensi Peraturan Daerah Yang Responsif (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah) sehingga tipe penelitian termasuk pada penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yakni di Kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Kantor Kecamatan, beberapa tempat pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat pembuangan Akhir Sampah (TPA) Antang yang diharapkan memudahkan peneliti untuk dapat melakukan wawancara secara langsung. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip-prinsip pelaksanaan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kota Makassar didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas mengenai materi muatan peraturan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah telah mengakomodir keterlibatan berbagai pihak, khususnya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar sehingga perda ini dapat dikatakan sebagai perda yang responsif. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan lebih spesifik merujuk pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kehadiran Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah mampu mendorong efektivitas pengelolaan sampah di Kota Makassar. Hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah daerah beserta perangkatnya dalam melakukan pelayanan kebersihan. Bukan hanya itu, program bank sampah juga telah berjalan dan sudah dirasakan efeknya oleh masyarakat.

Kata Kunci: Eektivitas, Pelayanan Publik, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Responsif,